



BUMKAl Terlibat Dukung Program Makan Bergizi Gratis

BANTUL, TRIBUN - Pemerintah bakal melibatkan pelaku penyedia makanan dari Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAl) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Salah satunya, BUMKAl di Kabupaten Bantul dikabarkan akan terlibat dalam penyedia makan siang bergizi dan gratis untuk mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto.

Direktur BUMKAl Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Hendri, mengatakan, beberapa waktu lalu, Badan Gizi Nasional dan jajaran instansi terkait sudah melakukan sosialisasi kepada sejumlah BUMKAl setempat.

“Jadi, kami berusaha melengkapi legalitas yang belum ada. Misalnya, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan segala

macam yang nanti dibutuhkan dalam penyelenggaraan itu. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada instruksi keterlibatan kami di dalam mendukung program makan bergizi dan gratis itu,” katanya kepada *Tribun Jogja*, Senin (2/12).

Saat disinggung terkait dengan alokasi anggaran per porsi yang turun, pihaknya berencana akan menggandeng kelompok masyarakat untuk menekan biaya produksi, namun masih mengutamakan kadar makanan yang bergizi.

Sekadar informasi, baru-baru ini, Presiden RI Prabowo Subianto, menurunkan alokasi anggaran makan siang bergizi dan gratis dari anggaran sebelumnya Rp15 ribu per porsi atau per anak, men-



● ke halaman 11



BUMKal Terlibat

● Sambungan Hal 1

jadi Rp10 ribu per porsi atau per anak.

"Kalau nanti program makan bergizi itu pelaksanaannya melibatkan BUMKal, maka kami akan menggandeng masyarakat atau akan mengoptimalkan dapur sendiri dengan melibatkan tenaga kerja dari kelompok masyarakat, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran," ucap dia.

Kemudian, untuk memenuhi standar gizi dan penyesuaian alokasi anggaran yang ditetapkan, pihaknya berencana menggandeng pemasok bahan baku bukan dari pasar. Akan tetapi, diutamakan dari sumber petani atau peternak lokal.

Peternak lokal

Hal itu dilakukan, selain mendukung program gizi Presiden Prabowo, pihak BUMKal Guwosari juga ingin mendukung kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

"Jadi, kami berencana mengambil pemasok bahan baku makanan itu dari sumbernya yakni petani atau peternak lokal. Nah, kalau soal teknis seperti pembagian ukuran item makanan, kami belum bisa berbicara sampai sana," tuturnya.

Namun, biasanya, bila terdapat orderan makanan dengan porsi budget rendah, pihaknya akan membuat ukuran porsi yang berbeda dari harga jual standar. Misalnya, dari sisi potongan daging ayam. Dalam bujet order rendah, maka potongan ayam itu akan lebih ke-

cil dibandingkan potongan daging ayam dengan budget standar.

"Tapi, penyesuaian itu tidak kami lakukan asal-asalan. Kami akan berdiskusi juga dengan pihak yang memesan. Sedangkan, untuk program makan bergizi dan gratis itu, nanti seperti apa penyesuaian budgennya, kami belum tahu karena belum ada petunjuk teknisnya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua BUMKal Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, Andri Isman-to, menyampaikan, bahwa pihaknya sempat mendapat kabar bahwa BUMKal akan terlibat dalam penyedia makanan program unggulan Presiden Kedelapan RI. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian atau instruksi yang resmi dari pemerintah pusat.

"Nah, untuk alokasi porsi makan yang tadinya Rp15 ribu dan sekarang menjadi Rp10 ribu per porsi, kami belum bisa bicara ke sana dulu. Karena belum ada kepastian, jadi kami tidak bisa memberikan tanggapan seperti apa nanti pembagian porsi makan dan item isi makanannya," urainya.

Kendati demikian, selama ini biasanya mereka menerima orderan makanan berupa nasi kotak dengan budget order standar Rp15 ribu per porsi. Dengan anggaran itu biasanya terdapat snack atau buah, nasi, lauk, dan sayur.

"Dan porsi lauk itu juga tergantung dengan dana pihak yang order. Karena lauk itu juga bermacam-macam, ada daging sapi, daging ayam, ikan, dan telur. Tapi,

kalau harus disesuaikan dengan budget Rp10 ribu per porsi untuk program Pak Prabowo, ya kami belum bisa menanggapi karena belum ada instruksi yang pasti," tandas dia.

Siapkan data

Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengaku adanya perubahan anggaran makan bergizi gratis pihaknya belum mendapatkan arahan dan petunjuk teknis terkait hal tersebut.

"Mohon maaf sampai saat ini belum ada arahan apapun dari pusat maupun provinsi baik tertulis maupun lisan terkait hal ini. Kami hanyadiminta untuk plotting anggaran senilai Rp26 miliar untuk program makan bergizi gratis, tetapi untuk teknisnya seperti apa kami belum mengetahui," paparnya.

Begitupun dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan petunjuk teknis terkait program tersebut. "Belum ada arahan terkait itu," tulis Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Agus Subariyanto saat dikonfirmasi.

Akan tetapi, Agus Menyebutkan, pihaknya sudah menyiapkan data jumlah pelajar dari jenjang PAUD/TK, SD/Sederajat, dan SMP/Sederajat di Kabupaten Gunungkidul. Adapun, total dari keseluruhan jenjang pendidikan itu sebanyak 93.597 pelajar.

"Data sudah kami siapkan seluruh jenjang dari PAUD/TK, SD dan SMP. Tapi, sekali lagi kami menunggu petunjuk dari pusat lebih lanjut," tandasnya. (nei/ndg)